

KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN DETEKSI ILUSI FISKAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016

Riztika Dyahningtyas, email: akitziirr@yahoo.com

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Sri Suharsih, email: asiheko@yahoo.com

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Sri Rahayu Budi Hastuti, email: rahayubudih@yahoo.com

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

ABSTRACT

This research aims to : (1) Analyzing the financial performance of districts/cities in the Daerah Istimewa Yogyakarta Province; (2) Analyzing the phenomena of fiscal illusions that occur in the finance of districts / cities in DIY Province. This research is based on secondary data, namely the Local Government Budget and Local Gross Domestic Product data sourced from the Ministry of Finance DJPK and BPS. The analytical tool used is financial independence ratio analysis, fiscal decentralization degree and panel data regression analysis. Based on the results of the analysis, it is known that the average independence ratio of the Regency / City of DIY Province is 30,38% and has a pattern of consultative relations with the central government. In the degree of fiscal decentralization, it is known that the Regency / City average is 17,35%. This means that the capacity of regional governments to manage regional finance is still lacking. In addition, there is a phenomenon of fiscal illusion in the financial performance of the Regency / City Regional Government of the DIY Province.

Keywords: The Financial Performance, Locally-Generated Revenue, Regional Expenditure, Fiscal Illusion

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. serta diharapkan semakin mandiri terhadap pemerintah pusat.

Besarnya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, kenyataan yang terjadi adalah dana transfer justru dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah dibandingkan dengan PAD. Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1999) (dalam Rusydi, 2010) diindikasikan sebagai ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Ilusi fiskal secara sederhana diidentifikasi dari peningkatan PAD yang tidak seimbang dengan peningkatan dana perimbangan terhadap belanja daerah, sehingga belanja daerah didominasi oleh dana perimbangan

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan serta menganalisis ada atau tidaknya ilusi fiskal pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY.

TINJAUAN LITERATUR

Kinerja Keuangan Daerah

Witmore 1997 (dalam Rusydi, 2010) menyatakan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang menggambarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Artinya semakin tinggi DDF suatu daerah, maka semakin baik daerah tersebut mengintensifkan penggunaan PAD nya

a. Ilusi Fiskal

Teori Ilusi Fiskal pertama kali dikemukakan oleh ekonom Italia bernama Amilcare Puviani (1903) yang menggambarkan ilusi fiskal terjadi saat pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam suatu institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Menurut pengertian tersebut ilusi fiskal terjadi karena pemerintah daerah melakukan rekayasa terhadap anggaran agar mampu mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam hal membayar pajak atau retribusi, dan juga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana dalam jumlah yang lebih besar. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal.

b. Deteksi Ilusi Fiskal

Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, dua diantaranya adalah melalui pengukuran pendapatan (*revenue enhancement*) (Hari Adi dan Ekaristi, 2009) dan melalui manipulasi belanja (*expenditure manipulation*). Pengukuran dengan pendekatan pendapatan mengasumsikan bahwa komponen penerimaan mempunyai hubungan positif dengan belanja.

Sedangkan pendekatan manipulasi belanja deteksi terjadinya ilusi fiskal dilakukan dengan melihat peran/kontribusi masing-masing komponen penerimaan terhadap peningkatan anggaran.

Analisis Deteksi Ilusi Fiskal

Dalam penelitian ini deteksi ilusi fiskal dilakukan melalui pendekatan pendapatan dengan menggunakan variabel PDRB, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH)

1. PDRB merupakan fungsi dari PAD (Santosa, 2005). Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Semakin besar PDRB maka akan menyebabkan penerimaan daerah yang besar dan belanja daerah yang besar, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara PDRB dengan belanja daerah
2. Berdasarkan pada teori Peacock dan Wiseman (dalam Rusyidi, 2010), dapat dilihat hubungan antara jumlah pajak daerah dengan pengeluaran. Pajak daerah dan belanja daerah memiliki hubungan positif.
3. Hubungan antara pendapatan daerah dan penerimaan daerah merupakan hubungan fungsional karena DAU merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Maimunah (2005) membuktikan pengaruh DAU terhadap belanja daerah dimana besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
4. Pola hubungan antara DBH terhadap penerimaan daerah secara fungsional, selanjutnya DBH berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah.

METODE

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD dan PDRB Kabupaten/Kota di DIY. Untuk menganalisis kinerja keuangan, peneliti menggunakan dua alat analisis yaitu :

c. Alat Analisis

- i. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah digunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

1. RKKD berfungsi untuk mengetahui tingkat kemandirian serta pola hubungan yang dimiliki antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berikut perhitungan RKKD (Mahmudi, 2010) :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat (BPP)}} \times 100\%$$

2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

DDF menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Berikut perhitungan DDF (Mahmudi, 2016)

$$DDF = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Persamaan Model regresi panel

ii. Deteksi Ilusi Fiskal

Untuk menganalisis ada tidaknya ilusi fiskal digunakan model regresi data panel sebagai berikut:

$$BD_t = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 TAX_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DBH_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

BD = Belanja Daerah

PDRB = Produk Domestik Regional
Bruto

TAX = Pajak Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

β_0 = Konstanta

$\beta_1.. \beta_4$ = Koefisien persamaan masing-masing variabel bebas

i = Cross Section

t = Time Series

e = error Term

Model ilusi fiskal selanjutnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\ln BD_t = \beta_0 + \beta_1 \ln PDRB_{it} + \beta_2 \ln TAX_{it} + \beta_3 \ln DAU_{it} + \beta_4 \ln DBH_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

$\ln BD$ = Belanja daerah

$\ln PDRB$ = PDRB daerah

$\ln TAX$ = Pajak daerah

$\ln DAU$ = Dana Alokasi

$\ln DBH$ = Dana Bagi Hasil

β_0 = Konstanta

$\beta_1.. \beta_4$ = Koefisien persamaan masing-masing variabel bebas

i = *Cross Section*

t = *Time Series*

e = *error Term*

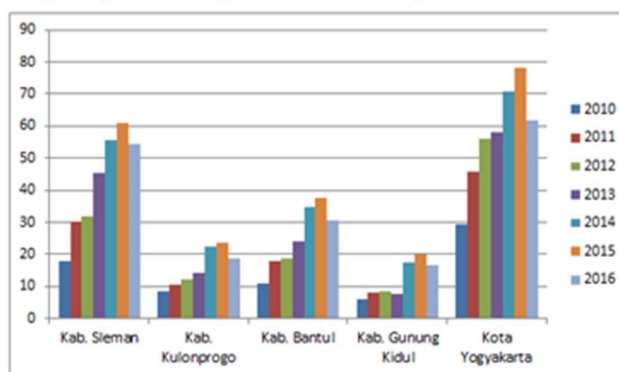
HASIL DAN ANALISIS

Data Perkembangan APBD Kabupaten/Kota Provinsi DIY dari sisi pendapatan, menunjukkan bahwa dana transfer tiap tahunnya masih mendominasi jika dibandingkan dengan PAD sendiri. Sejalan dengan sisi pendapatan, pada sisi pengeluaran. Seluruh Kabupaten/Kota mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari pendapatan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tiap-tiap Kabupaten/Kota masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Hal ini terbukti dari nominal dana transfer yang masih mendominasi total penerimaan daerah. Selain itu, dengan adanya nominal belanja daerah yang semakin besar tiap tahunnya, terdapat tanggung jawab besar yang diemban oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan apakah belanja daerah yang dilakukan sudah tepat sasaran atau tidak?.

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) pada gambar 4.1 menyatakan bahwa Kabupaten/Kota mengalami penurunan tingkat kemandirian pada tahun 2016. Pada tahun tersebut pemerintah pusat menaikkan dana perimbangan pada stuktur APBN sebesar 705 triliun.

Diharapkan dengan adanya kenaikan pada pos dana perimbangan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.



Sumber: data diolah, 2018

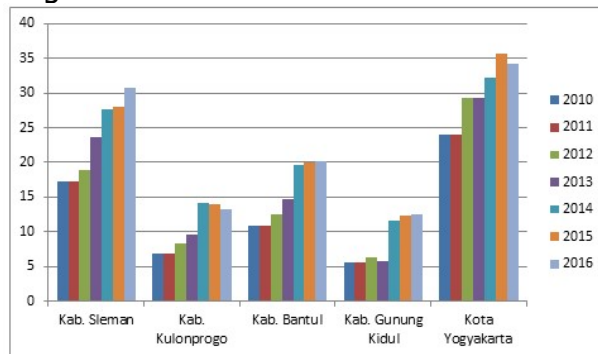
Gambar 4.1
Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Provinsi DIY
Tahun 2010-2016

Selain itu, pada tahun 2016 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY mengalami penurunan investasi luar negeri yang cukup drastis. Pada tahun sebelumnya, Kabupaten/Kota

Provinsi DIY memiliki Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar USD 89 Juta. Sedangkan pada tahun 2016, PMA hanya sebesar USD 18 Juta. Hal inilah yang cukup mempengaruhi PDRB di masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa secara keseluruhan Kabupaten/Kota Provinsi DIY memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan yang rendah yaitu sebesar 30,38%. Selain itu dapat dikatakan bahwa, Kabupaten/Kota di Provinsi DIY memiliki pola hubungan konsultatif dengan pemerintah pusat. Yaitu campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dapat dilihat bahwa nominal pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi DIY jauh lebih kecil dibandingkan besaran nominal bantuan dana pemerintah. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa, masing-masing Kabupaten/Kota dalam mengelola keuangan daerahnya belum mandiri seperti semestinya sesuai dengan hakikat otonomi daerah.



Sumber: data diolah, 2018

Gambar 4.3
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi DIY
Tahun 2010-2016

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) masing-masing Kabupaten/Kota telah mengalami perbaikan tiap tahunnya. Namun, dalam perkembangannya, masih terdapat Kabupaten/Kota yang mengalami stagnansi ataupun penurunan kemampuan untuk menjalankan desentralisasi. Sebagai contoh, Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini merupakan imbas dari tidak maksimalnya target PAD pada tahun sebelumnya. Selain itu, stagnansi yang dialami beberapa Kabupaten/Kota dapat dikarenakan kurangnya inovasi dari pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi daerah, yang nantinya akan menunjang PAD sendiri.

Secara keseluruhan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY memiliki rata-rata derajat desentralisasi fiskal yang rendah, yaitu sebesar 17,35%. Meskipun memiliki rerata rasio yang tidak seperti diharapkan, tetapi masing Kabupaten/Kota memiliki jumlah PAD yang terus meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan teknik pemilihan model estimasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulannya ialah memilih model *fixed effect*. Analisis statistik dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan hasil penghitungan seperti terlihat dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 4.10
Analisis Statistik dengan Regresi Berganda
Untuk Mendeteksi Ilusi Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
C	-24.38395	3.891400	-6.266111	0.0000	-
LNPDDB?	2.268895	0.318281	7.128590	0.0000	Tidak Terjadi Ilusi Fiskal
LNTAX?	0.030152	0.052748	0.571632	0.5725	Terjadi Ilusi Fiskal
LNDBH?	0.001408	0.024364	0.057796	0.9544	Terjadi Ilusi Fiskal
LNDAU?	0.064643	0.189215	0.341635	0.7354	Terjadi Ilusi Fiskal
R-squared		0.983169	Mean dependent var		14.04977
Adjusted R-squared		0.977990	S.D. dependent var		0.327167
S.E. of regression		0.048537	Akaike info criterion		-2.995930
Sum squared resid		0.061253	Schwarz criterion		-2.595984
Log likelihood		61.42878	Hannan-Quinn criter.		-2.857869
F-statistic		189.8468	Durbin-Watson stat		2.047813
Prob(F-statistic)		0.000000			

Sumber: data diolah (Lampiran 5)

Hasil nilai F tabel adalah 2,69. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi belanja daerah. Angka Adjusted R Square adalah 0.977990 menunjukkan 97,79% variasi naik turunnya belanja daerah dapat dijelaskan oleh variasi naik turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pajak daerah, DBH dan DAU. Sedangkan 2,21% dijelaskan oleh variabel yang lain. *Standar error of the regression* (0.048537) lebih kecil daripada *Std Deviation Belanja Daerah* (0.327167), maka model regresi lebih bagus dalam bertindak sebagai prediktor belanja daerah daripada rata-rata belanja daerah itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan yang positif dengan belanja daerah. Sedangkan Pajak Daerah, DBH dan DAU tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja daerah. Variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan karena nilai probabilitas < (lebih kecil atau sama dengan) 0,05. Sedangkan variabel pajak daerah, DBH dan DAU tidak memiliki pengaruh karena nilai probabilitas > (lebih besar atau sama dengan) 0,05.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan telah terjadi ilusi fiskal pada kinerja keuangan Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2010 hingga tahun 2016. Ini dikarenakan adanya variabel yang tidak memiliki korelasi terhadap belanja daerah.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat diketahui bahwa RKKD Kabupaten/Kota Provinsi DIY pada tahun anggaran 2010 – 2016 belum semua Kabupaten/Kota Provinsi DIY menyentuh pola hubungan partisipatif maupun delegatif terhadap pemerintah pusat. Meskipun demikian, tiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota telah melakukan upaya untuk dapat mandiri dengan adanya peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 25% - 50%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana transfer pusat masih tinggi.

Dilihat dari rerata, Kabupaten/Kota Provinsi DIY memiliki rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 17,35%. Persentase ini menunjukkan bahwa, jumlah Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah.

Variabel PDRB memiliki hubungan positif signifikan. Hal ini tidak mengindikasikan terjadi ilusi fiskal pada PDRB. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dude dkk (2014). Peneliti tersebut menghasilkan temuan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, baik secara parsial maupun secara simultan.

Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap variabel belanja daerah. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi ilusi fiskal pada variabel pajak daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo (2016) yang menyatakan pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat disebabkan kurang efisiennya sistem pemungutan pajak serta kurang sadarnya masyarakat untuk membayar pajak.

Variabel DBH tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi ilusi fiskal pada variabel DBH. DBH memiliki koefisien positif, hal ini berarti peningkatan DBH akan meningkatkan belanja daerah namun tidak signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Elisabeth (2018), penelitiannya membuktikan bahwa DBH memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Hal ini mendandakan bahwa potensi daerah tidak dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.

Variabel DAU tidak memiliki hubungan yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rusmita (2016), ia membuktikan pengaruh DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Realitas ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian

pengalokasian DAU Sehingga ada indikasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota Provinsi DIY memiliki nilai yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih sangat bergantung pada dana transfer untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Adanya sifat kebergantungan seperti ini, membuat pemerintah daerah melakukan perilaku asimetris terhadap dana transfer yang ada dan menyebabkan ilusi fiskal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jika dilihat dari rata-rata rasio kemandirian keuangan dan derajat desentralisasi fiskal tergolong rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif.
2. Terjadi fenomena ilusi fiskal dalam kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saran

1. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Dan mencari alternatif untuk membiayai kekurangan.
2. Bagi pemerintah daerah, hendaknya mengelola dan mengalokasi keuangan daerah yang lebih tepat sasaran dan efisien. Bagi pemerintah pusat, perlu lebih mempertimbangkan tingkat kebutuhan pemerintah daerah serta senantiasa melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah. Hal ini dilakukan agar dana perimbangan tepat sasaran dan berguna, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

REFERENSI

- Atiah, Handayani (2009), Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah), *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis IESP Universitas Diponegoro, Semarang, Dipublikasikan.
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto (2010), "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007", *Jurnal GaneÇ Swara Edisi Khusus*. Vol. 4 No.3.
- Budi Santosa, Purbayu (2005), "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Universitas Diponegoro. Vol.2, Hal 14.
- BPS (2018), *Statistik Kabupaten Sleman dalam Angka* tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sleman.
- BPS (2018), *Statistik Kabupaten Bantul dalam Angka* tahun 2012, 2014, 2015, 2016, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bantul.
- BPS (2018), *Statistik Kabupaten Gunung Kidul dalam Angka* tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gunung Kidul.
- BPS (2018), *Statistik Kabupaten Kulonprogo dalam Angka* tahun 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ponorogo.
- BPS (2018), *Statistik Kota Yogyakarta dalam Angka* tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Badan Pusat Statistik, Kota Madiun.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2018), Laporan Realisasi APBD tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Jakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2016), Selayang Pandang : Dana Alokasi Umum.
- Dude, dkk (2014), "Analisis Kinerja Keuangan Dan *Fiscal Illusion* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2012", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.14, Hal 12.
- Elisabeth (2018), Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypapper Effect* Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Halim, Abdul (2007) Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Hari Adi, Priyo dan Puspa Dewi Ekaristi (2009), "Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", *Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Vol.6, Hal 1-19.
- Hari Adi, Priyo dan Laras Wulan Ndadari (2008), "Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat", *Jurnal*, Disajikan pada *The 2nd National Conference UKWMS* Surabaya.

- Jayanti, Agustina Tri (2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Desentralisasi Fiskal Kabupaten/kota Provinsi DIY tahun 2007-2014, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, *Skripsi*, Tidak dipublikasikan.
- Kuncoro, Haryo (2007), "Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten atas Perubahan Besaran Transfer dari Pemerintah Pusat", *Jurnal Ekonomi*, Disajikan pada *The 1st Accounting Conference*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mahmudi (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi (2016), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Maimunah, Mutiara (2006), "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera", *Jurnal*, Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Nugroho, Fajar (2012), Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Dipublikasikan.
- Pratomo, Yulius Agus L. (2016), Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bantul, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Rachim, Ratri Furry P (2013), Evaluasi Pemekaran wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis IESP Universitas Diponegoro, Semarang, Dipublikasikan.
- Rusmita, Sari (2016), "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol 5. No. 3.
- Rusyidi, Bahrul Ulum (2010), Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal Provinsi di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis IESP Universitas Diponegoro, Semarang, Dipublikasikan.
- Sidik, Dr.Machfud, Dr.B. Raksaka Mahi, Dr. Robert Simanjuntak, Dr. Bambang Brodjonegoro (2002), *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Kompas, Jakarta.

Siregar, Hara Rizky (2012), Analisis Determinan dan Deteksi Ilusi Fiskal Pada Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara, *Thesis*, Universitas Sumatera utara. Dipublikasikan.

Sriyana, Jaka (2011), "Kinerja Fiskal Daerah : Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Islam Indonesia. Vol. 15 No.2.

Suparmoko (2002), *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, ANDI, Jakarta.

_____, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Widarjono, Agus (2013), *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Keempat, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.